

**IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY/SMART KAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI**



Oleh:

Zulkarnain

NIM: 22200012007

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**

Gelar Master of Arts (M.A)

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

Yogyakarta

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnain S.I.P.
NIM : 22200012007
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN
YOGYAKARTA




Zulkarnain S.I.P.
NIM. 22200012007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnain S.I.P.
NIM : 22200012007
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN MUGILA
YOGYAKARTA



Zulkarnain S.I.P.
NIM. 22200012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Program Smart City/Smart Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULKARNAIN, S.I.P.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012007
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sadang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED

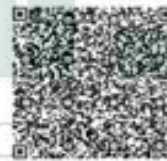
Valid ID: 67837c668d90a6



Penguji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 678757453a2b7f



Penguji III

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 67850e927ebd8f



Yogyakarta, 08 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6780753187ee76

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Implementasi Program Smart City/Smart Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai**

yang ditulis oleh:

Nama : Zulkarnain S.I.P.
NIM : 22200012007
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpedapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 1971207 200901 1 003

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai adaptasi lokal dari konsep Smart City. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis proses implementasi, tantangan, dan dampak dari program tersebut terhadap pemerintahan dan masyarakat desa. Kerangka teori penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pada daya traktabilitas masalah, kemampuan peraturan, serta pengaruh faktor eksternal terhadap implementasi. Dengan pendekatan eksploratif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari desa-desa yang terlibat, yaitu Desa Tongke-Tongke, Desa Kaloling, dan Desa Salohe. Ketiga desa ini dipilih berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencerminkan status perkembangan desa sebagai mandiri, maju, dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Smart Kampung telah membawa perubahan positif dalam pelayanan publik, seperti penyediaan Sistem Informasi Desa (SID) dan digitalisasi administrasi kependudukan. Namun, implementasi menghadapi kendala seperti infrastruktur internet yang belum merata, keterbatasan pasokan listrik, dan rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan teknologi. Faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas program dalam memberikan layanan yang lebih efisien dan transparan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi Smart Kampung di Sinjai sangat bergantung pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi masyarakat, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal, program ini memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat pedesaan.

Kata Kunci: Smart Kampung, Pelayanan Publik Digital, Implementasi Kebijakan

MOTTO

“Lelah, tapi tetap harus berusaha”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh hormat, karya ini saya persembahkan:

Untuk diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas keteguhan hati dalam melewati batas-batas ketidakmungkinan, mengatasi keraguan, dan menghadapi semua tantangan selama perjalanan panjang 4 tahun di tanah rantau hingga gelar S2 kini hampir tergapai dalam gengaman.

Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Muh. Ramli dan Ibu Sahriah atas doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti yang selalu menjadi semangat saya.

Untuk saudara saya Tarmizi Ramli dan Istrinya serta keponakan saya yang senantiasa memberikan inspirasi dan kebersamaan dalam setiap langkah.

Untuk seluruh kawan seperjuangan di IPKP angkatan 2023 terima kasih atas persahabatan, motivasi, dan kenangan yang tidak terlupakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul ***“Implementasi Program Smart City/Smart Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai”*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan bagian dari upaya akademik untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kabupaten Sinjai.

Dalam era yang semakin digital, penerapan konsep *Smart City* dan *Smart Kampung* tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi juga peluang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Sinjai, dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya, menawarkan konteks unik untuk mengkaji sejauh mana program ini dapat diimplementasikan secara optimal. Tesis ini mencoba untuk memberikan gambaran menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta menganalisis dampak yang telah dan dapat ditimbulkan oleh program ini terhadap masyarakat dan pemerintahan.

Proses penyelesaian tesis ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan , S.Ag.,M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi akses serta kemudahan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Dr. Nina Mariani, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi interdisciplinary Islamic Studies (IIS) dan jajarannya atas segala kebijakan memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.
3. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi Interdisiplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang telah memberikan data, informasi, dan akses untuk mendukung penelitian ini.
6. Pemerintah Desa Tongke-tonge, Desa Kaloling, Desa Salohe yang telah memberikan data, informasi, dan akses untuk mendukung penelitian ini.
7. Kepada keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses ini berlangsung.
8. Seluruh kawan di Konsentrasi, Pembangunan, dan Kebijakan Publik Angkatan 2023 yang telah memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi semangat selama proses pembelajaran pada jenjang studi magister ini,

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pemerintah daerah dan menjadi inspirasi bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami topik serupa.

Akhir kata, semoga upaya kecil ini dapat turut berkontribusi dalam mendorong transformasi digital di Kabupaten Sinjai, menuju masyarakat yang lebih cerdas, inovatif, dan inklusif.

Amin ya Rabbal alamin

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Penulis



Zulkarnain S.I.P.

Nim: 22200012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KABUPATEN SINJAI DALAM PERJALANAN SMART KAMPUNG	32
A. Dasar Hukum dan Pilar Smart Kampung	32
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2014.....	32

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government.....	34
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	37
4. (PERGUB) provinsi Sulawesi Selatan nomor 131 tahun 2017	40
5. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah	41
B. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai.....	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Pemerintahan.....	46
C. Kondisi Umum Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai Sebagai Pelaksana Program Smart Kampung	49
D. Kondisi Umum Tiga Desa Lokasi Penelitian	52
1. Desa Tongke-tongke	52
2. Desa Kaloling.....	56
3. Desa Salohe.....	58
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY/SMART KAMPUNG	
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI.....	60
A. Gambaran Umum Program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai.....	60
B. Implementasi Smart Kampung di Kabupaten Sinjai	65
1. Pelayanan Publik Digital.....	65
2. Pemberdayaan Ekonomi Desa	81
3. Pengelolaan data desa berbasis teknologi melalui website desa.....	93
C. Tantangan dalam Implementasi Smart Kampung Di Sinjai	99
1. Sarana dan Prasarana	99
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).....	105

3. Anggaran yang Terbatas	109
4. Kebijakan yang Belum Optimal	110
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY/SMART KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINJAI	112
A. Analisis Daya Traktabilitas Masalah dalam Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai.....	112
B. Kemampuan Peraturan untuk Menstrukturkan Implementasi	115
C. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai.....	118
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Frame Work Imlementasi Kebijakan dari Mazmanian & Sabatier....	14
Gambar 2 - Peta Kab. Sinjai.....	44
Gambar 3 - Diagram Status Website Desa dan Kelurahan di Kab. Sinjai	69
Gambar 4 - Website Desa Tongke-tongke	71
Gambar 5 - Website Desa Salohe.....	74
Gambar 6 - Website Desa Kaloling	76
Gambar 7 - Lapak Desa Tongke-tongke	83
Gambar 8 - Data Bantuan Desa Tongke-tongke	84
Gambar 9 - Fitur Potensi Desa Salohe	86
Gambar 10 - Fitur Potensi Desa Kaloling.....	90
Gambar 11 - Sosialisasi Smart Kampung Tahun 2022	107
Gambar 12 - Bimtek Website Desa.....	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Luas wilayah Kabupaten Sinjai	45
Tabel 2 - Tim Pelaksana Program Smart Kampung.....	51
Tabel 3 - daftar Pekerjaan Penduduk Desa Tongke-tongke.....	52
Tabel 4 - Aspek Layanan Digital	80
Tabel 5 - Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Website	92
Tabel 6 - Perbandingan Pengelolaan Data Desa	98
Tabel 7 - Tantangan dalam Implementasi Smart Kampung	114



DAFTAR SINGKATAN

TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
APTIKA	: Aplikasi Informatika
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
INPRES	: Instruksi Presiden
SID	: Sistem Informasi Desa
SIDEKA-Ng	: Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KOMINFO	: Komunikasi dan Informatika
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
SIMDES	: Sistem Informasi Manajemen Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERGUB	: Peraturan Gubernur
MoU	: Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern, menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.¹ Perkembangan teknologi informasi dalam konteks Indonesia terjadi hampir di semua bidang administrasi kehidupan masyarakat. Dimana, dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan electronic government dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.² Konvergensi teknologi telah mengubah pola komunikasi, transaksi, dan interaksi masyarakat, termasuk dalam konteks layanan publik dan administrasi pemerintah.³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep *Smart City* muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, dan daya saing daerah. Smart city tidak hanya berfokus pada modernisasi infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan

¹ Muhamad Ngafifi, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (2014), 33–47 <<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>>.

² Dengen Nataniel and Heliza Rahmania Hatta, 'Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser', 4.1 (2009), 47–54.

³ Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, 'Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444>>.

ekonomi.⁴ Smart city sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kehidupan penduduk dalam penggunaan teknologi dan akses terhadap koneksi internet menjadi hal yang penting saat ini, bukan sekedar pilihan.⁵

Pembangunan berbasis smart city telah menjadi tren pembangunan kota di seluruh dunia. Pengembangan smart city bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi juga bagaimana mengembangkan masyarakat dengan membuat Infrastruktur dan fasilitas TIK sebagai faktor pendukung. Smart city didefinisikan sebagai kota inovatif dalam pemanfaatan TIK dan sarana lainnya meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan perkotaan, dan daya saing, serta berkelanjutan.⁶

Dalam konteks global, konsep smart city muncul sebagai respons terhadap kebutuhan integrasi teknologi dalam kehidupan perkotaan. Smart city bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, memperbaiki kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui teknologi informasi. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memprakarsai Gerakan Menuju 100 Smart City untuk mengadopsi konsep ini di berbagai kota dan kabupaten. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta para ahli untuk menciptakan kawasan yang lebih cerdas dan inovatif.⁷

⁴Nindya Sari Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, Dian DInanti, *Smart Village Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Inovasi Dan Digital*, ed. by Tim UB Press, 1st edn (UB Press, 2021).

⁵ Łukasz Komorowski and Monika Stanny, 'Smart Villages: Where Can They Happen?', *Land*, 9.5 (2020) <<https://doi.org/10.3390/LAND9050151>>.

⁶ Suresh Renukappa and others, 'Evaluation of Smart Village Strategies and Challenges', *Smart and Sustainable Built Environment*, 2022, doi:10.1108/SASBE-03-2022-0060.

⁷ Leski Reskinaswara, 'Gerakan Menuju 100 Smart City', *KOMINFO*, 2022 <<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/gerakan-menuju-100-smart-city-2/>> [accessed 20 March 2024].

Namun, penerapan konsep smart city tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan. Indonesia, dengan karakteristik geografis yang luas dan beragam, membutuhkan pendekatan khusus untuk wilayah pedesaan yang sering kali tertinggal dari segi infrastruktur dan akses teknologi. Konsep smart village muncul sebagai solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan desa, memadukan teknologi dengan potensi lokal untuk menciptakan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.⁸ Smart village merupakan konsep baru yang dikembangkan oleh peneliti dari India, N. Viswanadham, dan Sowmya Vedula. Konsep ini dikembangkan pada tahun 2010, dengan mendeskripsikan ekosistem desa dan memetakan prosedur desain terpadu untuk membangun desa cerdas.⁹

Kabupaten di Indonesia yang mulai menerapkan program *smart city* yaitu Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang telah mengadopsi konsep ini dengan meluncurkan program Smart Kampung. Pemerintah daerah menyadari bahwa konsep smart city kurang relevan untuk wilayah yang mayoritas terdiri dari desa. Oleh karena itu, Smart Kampung menjadi strategi yang lebih sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, ekonomi, dan sosial.

Program Smart Kampung di Sinjai dirancang untuk menciptakan desa yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi berbasis serat

⁸ Rini Rachmawati, 'Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency', *Jurnal Sistem Cerdas*, 1.2 (2018), pp. 12–19, doi:10.37396/jsc.v1i2.9.

⁹ Dian Herdiana, 'Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia', *IPTEK-KOM*, 1–6 (2019).

optik. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁰ Program ini menjadi program unggulan yang juga diatur dalam Peraturan Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan definitif. Berdasarkan data dari bagian pemerintahan kantor sekretariat daerah Kabupaten Sinjai, pada tahun 2015 terdapat 67 Desa definitif, dan 13 Kelurahan.¹¹

Dalam membangun desa cerdas, pemerintah desa harus menetapkan tujuan, apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan apa yang menjadi pendukungnya. Motivasi di balik kampung pintar adalah teknologi harus bertindak sebagai pembangunan, membawa melalui pendidikan, peluang bisnis lokal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan keterlibatan demokrasi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa, konsep ini dapat dijadikan dasar pembangunan pedesaan di Indonesia.

Sinjai, sebagai salah satu daerah menjadi sorotan dengan penerapan konsep smart kampung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini menjadi pilihan strategis bagi pemerintah setempat untuk memperkuat Sinjai sebagai bagian

¹⁰ S. A. ANAS, 'Dampak Kebijakan Pariwisata Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi (Studi Di Desa Blimbingsari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi.', 2011.

¹¹ Dpmtsp.sulselprov.go.id, 'Profil Kabupaten Sinjai', *Dpmtsp.Sulselprov.Go.Id*, 2020 <<https://dpmtsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=17>> [accessed 20 March 2024].

dari jaringan *Smart City* yang semakin berkembang di Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur digital yang semakin merata, penerapan smart kampung di Kabupaten Sinjai diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu poin penting dalam implementasi smart kampung di Kabupaten Sinjai adalah upaya untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di setiap desa. Melalui penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau, masyarakat di berbagai pelosok desa dapat terhubung dengan layanan pemerintah dan informasi publik secara mudah dan efisien. Dengan demikian, kesenjangan digital antarwilayah dapat diminimalisir, menjadikan Sinjai sebagai model pemerataan teknologi di tingkat lokal.

Selain infrastruktur teknologi, pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Smart Kampung. Pelatihan dan pembekalan keterampilan digital bagi aparat desa dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Masyarakat juga didorong untuk lebih aktif memanfaatkan layanan digital, mulai dari administrasi kependudukan hingga akses informasi kesehatan dan pendidikan.¹² Kemudahan pelayanan menjadi fokus utama dalam konsep kampung pintar di Kabupaten Sinjai. Berbagai layanan publik, seperti pendaftaran kependudukan, pembayaran pajak, dan permohonan izin usaha, dapat diakses secara online melalui platform digital yang telah disediakan. Hal ini tidak hanya

¹² Dwian Hartomi Akta Padma Eldo and Nur Inzana, 'Peluang Dan Tantangan Smart Village Di Era 4.0 (Studi Analisis Desa Dukuhtaji Kidul Kabupaten Tegal)', *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*, 5.2 (2022), pp. 84–93 <<https://doi.org/10.24905>>.

mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik secara keseluruhan.¹³

Dengan berbagai upaya ini, Kabupaten Sinjai semakin menjelma menjadi bagian integral dari jaringan *smart city* di Indonesia. Program ini membawa dampak signifikan dalam mempercepat digitalisasi di pedesaan dan mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan akses internet yang luas dan terjangkau, masyarakat desa dapat menikmati layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di berbagai lini kehidupan.

Salah satu tujuan program smart kampung di kabupaten Sinjai yaitu untuk mengintegrasikan seluruh elemen dalam sebuah sistem teknologi informasi dan juga sebagai solusi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik atau digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, memerlukan strategi atau langkah yang tepat dalam melaksanakan program kampung pintar di kabupaten sinjai.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, Smart Kampung mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pengentasan kemiskinan (tujuan nomor 1) dan pembangunan infrastruktur yang tangguh (tujuan

¹³ Sekar Ayuntamara and Choirul Anam, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Kurikulum," *Jurnal Al-Yasin* 11, no. 361 (2021): 497–505.

nomor 9).¹⁴ Dengan pendekatan yang integratif dan inklusif, diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Melihat kompleksitas dan potensi pengembangan Smart Kampung, pendekatan penelitian eksploratif sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses implementasi, tantangan, dan dampak dari penerapan Smart Kampung di Kabupaten Sinjai. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan model pengembangan yang dapat direplikasi di daerah lain. Studi ini juga memberikan perspektif baru dalam pengembangan pedesaan berbasis teknologi informasi. Melalui penelitian eksploratif, diharapkan teridentifikasi berbagai inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal, serta strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi desa dalam menghadapi era digital.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah strategis dalam memahami dan mengembangkan konsep Smart Kampung sebagai model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini memperkaya literatur akademik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan berbasis data yang mendukung transformasi digital di pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai;

¹⁴ United Cities and Local Government Asia-Pacific, 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah', *United Cities and Local Government*, 2017, pp. 1–24 <<https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>>.

1. Bagaimana implementasi program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tantangan dalam implementasi program smart kampung di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dan signifikansi penelitian yaitu:

1. Mengkaji proses implementasi program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten sinjai
2. Mengkaji tantangan dalam implementasi program smart kampung di Kabupaten Sinjai

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada tinjauan terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu artikel yang mengkaji tentang program pemerintah daerah mengenai smart village dengan menggunakan analisis fokus yang berbeda-beda. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual terkait pengembangan smart village berdasarkan literatur yang relevan baik di tingkat internasional maupun nasional.

Beberapa penelitian internasional memberikan perspektif penting mengenai implementasi konsep ini. Model konseptual smart village dari Muhammad Mishbah et al., dari hasil penelitiannya mengusulkan kerangka kerja berbasis empat komponen utama (tujuan, strategi, dimensi, dan fondasi) yang mengintegrasikan

aspek ekonomi, teknologi informasi, tata kelola, lingkungan, dan energi.¹⁵ Sedangkan di India, hasil penelitian terkait smart village menggarisbawahi pentingnya pengembangan desa mandiri melalui akses energi modern yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, serta mengintegrasikan kelestarian lingkungan.¹⁶ Penelitian serupa di Tripura oleh Dr. Bindu Ranjan Chakma menunjukkan potensi adopsi smart village untuk mengatasi migrasi desa ke kota dan menciptakan kehidupan berkelanjutan di pedesaan.¹⁷

Di Korea, konsep smart village diintegrasikan dengan diversifikasi kegiatan non-pertanian, seperti pembangunan sistem inovasi daerah, pengembangan pertanian yang dijadikan sebagai nilai tambah, dan pariwisata pedesaan sebagai strategi revitalisasi ekonomi pedesaan dan pembangunan smart village yang memperkuat interaksi desa dan kota.¹⁸ Sementara itu, penelitian di Polandia menyoroti pentingnya kerja sama jaringan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.¹⁹

¹⁵ Muhammad Mishbah, Betty Purwandari, Dana Indra and (ICITSI), 'Systematic Review and Meta-Analysis of Proposed Smart Village Conceptual Model: Objectives, Strategies, Dimensions, and Foundations', International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 2018, 127–33 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:133605942>>.

¹⁶ Rutuja Somwanshi and others, 'Study and Development of Village as a Smart Village', *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 7.6 (2016), pp. 395–408 <<http://www.ijser.org>>.

¹⁷ R Biswas, BR Chakma - The Journal of Development, and undefined 2023, 'Driving Development through Smart Village in Tripura: An Overview', *Journals.Dbuniversity.Ac.In*, 8, p. 2023 <<https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/jdp/article/view/4032>>.

¹⁸ Seongwoo Park, Jonghoon and Lee, 'Smart Village Projects in Korea: Rural Tourism, 6th Industrialization, and Smart Farming', 2019, pp. 139–53 <https://www.researchgate.net/publication/333147997_Smart_Village_Projects_in_Korea_Rural_Tourism_6th_Industrialization_and_Smart_Farming>.

¹⁹ Mieczyslaw Adamowicz and Magdalena Zwolinska-Ligaj, 'The "Smart Village" as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland', *Sustainability (Switzerland)*, 12.16 (2020), doi:10.3390/su12166503.

Secara keseluruhan, penelitian literatur internasional diatas menunjukkan bahwa konsep smart village menawarkan pendekatan holistik untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang mendukung, desa pintar dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah pedesaan di berbagai negara.

Di Indonesia, penelitian mengenai smart village juga menunjukkan keragaman pendekatan dan tantangan. Rini Rachmawati dalam penelitiannya menekankan perbedaan pendekatan antara kota, kabupaten, dan desa dalam implementasi smart village dengan fokus pada penguatan kapasitas lokal yang merujuk pada peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa untuk pengelolaan mandiri serta inovasi ekonomi dan sosial.²⁰ Penelitian oleh Irwan Waris dkk. mengevaluasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong dalam mewujudkan konsep Desa Pintar berbasis digital melalui metode kualitatif dan deskriptif dengan studi kasus di tiga kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Siniu yang menunjukkan bahwa meskipun implementasi Desa Pintar belum sepenuhnya terwujud, beberapa desa telah memulai penggunaan teknologi digital dalam bentuk sederhana sebagai langkah awal.²¹

Selain itu, penelitian tentang percepatan transformasi digital di desa, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang berjudul *Acceleration of Sustainable Smart*

²⁰ Rini Rachmawati. Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency', *Jurnal Sistem Cerdas*, 1.2 (2018), pp. 12–19, doi:10.37396/jsc.v1i2.9.

²¹ Irwan Waris, Ani Susanti, and Muhammad Afandi, 'Preparation of Smart Village in Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 8.1 (2024), pp. 7–13, doi:10.11648/j.jpaa.20240801.12.

Cities and Villages, menggarisbawahi pentingnya infrastruktur digital dan literasi teknologi untuk mempercepat pembangunan desa cerdas. Pada masa pandemic smart village juga sangat berpengaruh dalam pelayanan publik, seperti hasil penelitian di Desa Mojowarno menunjukkan bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik digital pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi digital, seperti keterbukaan informasi, dan layanan online administrasi kependudukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi desa.²² Selanjutnya, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam perspektif desa pintar di Kabupaten Jombang menekankan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lingkungan sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program smart village dalam pembangunan desa.²³

Penelitian yang dilakukan di dalam negeri bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan konsep Smart Village di Indonesia. Penelitian-penelitian ini berfokus pada bagaimana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan meningkatkan pelayanan publik. Setiap penelitian memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, mulai dari evaluasi kesiapan daerah, pengembangan infrastruktur digital, hingga inovasi pelayanan publik di masa pandemi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan

²² M. Addiansyah, 'Desa Cerdas Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Endemi: Belajar Dari Desa Mojowarno', *Matra Pembaruan*, 8.1 (2024), pp. 75–88, doi:10.21787/mp.8.1.2024.75-88.

²³ Ajie Hanif Muzaqi and Berlian Tyasotyningarum, 'Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency)', *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10.1 (2022), pp. 42–53, doi:10.21070/jkmp.v10i1.1683.

secara universal, melainkan harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing desa.

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan Smart Village di Indonesia. Penekanan pada kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian terhadap karakteristik lokal menjadi kunci dalam menciptakan desa yang cerdas dan berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang ditawarkan pada penelitian sebelumnya untuk pengembangan Smart Village yaitu perlunya pedoman yang jelas, peningkatan kapasitas masyarakat, dan dukungan dari pemerintah untuk program-program desa serta inovasi pelayanan public berbasis teknologi.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai smart kampung di Kabupaten Sinjai memberikan fokus baru dengan mengeksplorasi implementasi program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pendekatan eksploratif yang digunakan bertujuan untuk menemukan hubungan baru terkait fenomena implementasi smart village di tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan program tetapi juga mengidentifikasi persepsi, motivasi, serta tindakan para pelaku di lingkungan alami mereka, sehingga memberikan wawasan mendalam terkait keberhasilan dan tantangan implementasi program tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Pada kerangka teoritis yaitu pada tahap membantu dalam menjelaskan permasalahan seputar rumusan masalah. Berangkat dari hal tersebut, dengan itu teori mempunyai peran penting dalam menyelesaikan berbagai suatu persoalan

dalam suatu kajian. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana penerapan program kampung pintar di kabupaten sinjai dalam mempermudah pelayanan public. Maka, berikut teori yang saya perlukan dalam menganalisis permasalahan tersebut, di antara lain:

1. Teori Proses Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier

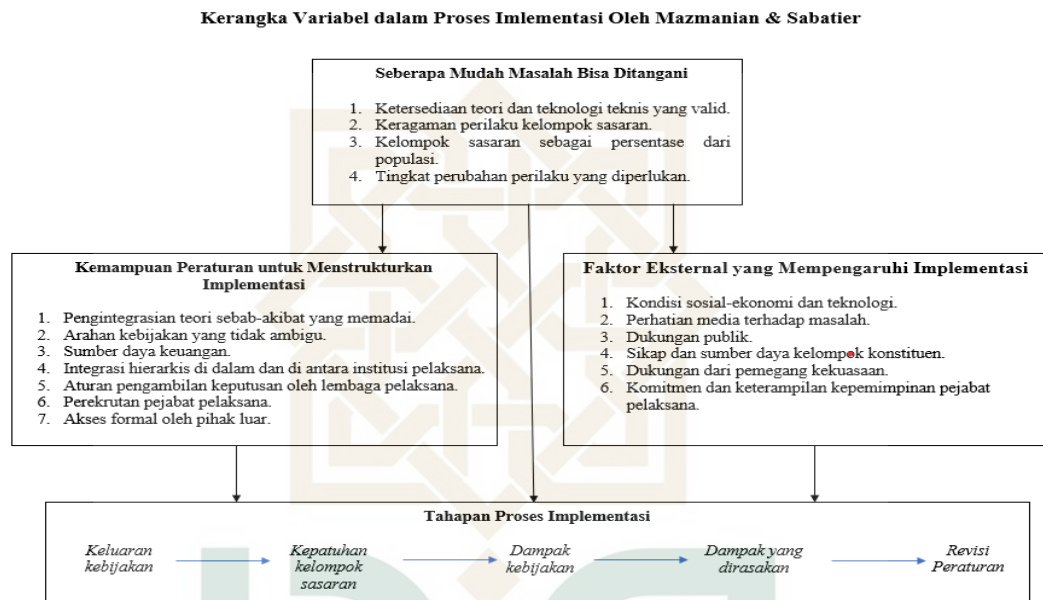
Salah satu metode populer dalam analisis kebijakan publik adalah model implementasi kebijakan yang sudah dikembangkan oleh Sabatier & Mazmanian. Dimana 1980, Mazmanian & Sabatier mengatakan *"Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually made in a statute (although also possible through important executive orders or court decisions). Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the implementation process"*.²⁴ Dalam hal ini, implementasi kebijakan melibatkan analisis tentang apa yang terjadi setelah kebijakan diadopsi, termasuk bagaimana karakteristik undang-undang memengaruhi peristiwa-peristiwa berikutnya, bagaimana proses implementasi berjalan, dan bagaimana dampak akhirnya pada masyarakat.²⁵ Dengan model implementasi kebijakan ini, penulis dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program

²⁴ D. Sabatier, P., & Mazmanian, "Conceptual Framework, The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis, Universitas of California and Pomona College," *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980): 538–560, <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266>.

²⁵ M.Si Dr. Agus Subianto, *KEBIJAKAN PUBLIK Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant Didistribusikan Oleh PT Menuju Insan Cemerlang Media Distribusi Cemerlang Landmark Modern Shop House A-17*, 2020, http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/KebijakanPublik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

kampung pintar yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Adapun berikut ini, bagan frame work implementasi kebijakan.

Gambar 1
Frame Work Imlementasi Kebijakan dari Mazmanian & Sabatier²⁶



Sumber: Policy Studies Journal

Model Mazmanian & Sabatier ini diklasifikasikan oleh Riant Nugroho sebagai model Top Down dan lebih berfokus pada mekanisme paksaan daripada mekanisme pasar²⁷. Dalam gambar kerangka frame work implementasi kebijakan menunjukkan ada tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu²⁸:

²⁶ Ibid.

²⁷ Dr. Riant Nugroho, *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Politik*, ed. by Yulian Masda, 7th edn (2023) <https://books.google.co.id/books?id=WCG_EAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

²⁸ Mulyono, 'Model Kerangka Analisis Implementasi (Daniel Mazmanian Dan Paul A. Sabatier)', *Free Writing in the Wall*, 2009 <<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/31/model-kerangka-analisis-implementasi-daniel-mazmanian-dan-paul-a-sabatier/>>.

a. Daya Traktabilitas Masalah (Seberapa Mudah Masalah Bisa Ditangani)

Daya traktabilitas masalah mengacu pada sejauh mana sebuah masalah dapat diatasi atau diselesaikan melalui kebijakan publik. Faktor ini sangat penting dalam menentukan apakah kebijakan yang dirancang akan berhasil atau menghadapi hambatan serius selama implementasi. Ada empat komponen utama yang memengaruhi daya traktabilitas masalah:

1. Ketersediaan Teori dan Teknologi yang Valid

Kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan teori yang relevan dan teknologi yang memadai. Teori yang valid memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami akar masalah dan merancang solusi yang sesuai. Sebagai contoh, jika masalah yang dihadapi adalah polusi udara, teori ilmiah tentang penyebab polusi dan teknologi untuk mengurangi emisi akan menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan. Tanpa teori dan teknologi yang memadai, kebijakan cenderung bersifat spekulatif dan sulit diimplementasikan dengan baik.

2. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Semakin beragam perilaku kelompok sasaran, semakin sulit bagi kebijakan untuk memberikan dampak yang seragam. Perbedaan dalam budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat dapat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan.

Misalnya, dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, masyarakat yang tinggal di daerah urban mungkin lebih mudah menerima alternatif, sementara masyarakat pedesaan dengan akses terbatas ke sumber daya mungkin lebih sulit mengikuti kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keragaman perilaku ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam desain dan implementasi kebijakan.

3. Kelompok Sasaran Sebagai Persentase dari Populasi

Besarnya kelompok sasaran dalam kaitannya dengan total populasi juga memengaruhi daya traktabilitas masalah. Jika kelompok sasaran adalah sebagian kecil dari populasi, maka kebijakan dapat lebih mudah diterapkan karena dampaknya lebih terbatas. Sebaliknya, jika kebijakan menysasar sebagian besar populasi, maka tantangan implementasi akan semakin besar karena melibatkan lebih banyak individu dan institusi. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan wajib untuk seluruh anak usia sekolah akan jauh lebih kompleks dibandingkan kebijakan yang hanya menysasar kelompok kecil, seperti anak-anak dari keluarga tertentu.

4. Tingkat Perubahan Perilaku yang Diperlukan

Beberapa kebijakan membutuhkan perubahan perilaku yang signifikan dari kelompok sasaran, dan tingkat perubahan ini memengaruhi keberhasilan kebijakan. Jika perubahan yang diminta kecil, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi,

masyarakat cenderung lebih mudah beradaptasi. Namun, jika perubahan perilaku yang diminta sangat besar, seperti mengubah pola konsumsi energi atau gaya hidup sehari-hari, maka resistensi masyarakat cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat perubahan perilaku yang diminta harus diperhitungkan dengan cermat dalam merancang kebijakan.

Daya traktabilitas masalah menjadi dasar penting dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan empat komponen ini memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Sebaliknya, jika kebijakan tidak memperhatikan faktor-faktor ini, maka risiko kegagalan implementasi menjadi lebih tinggi, terlepas dari seberapa baik kebijakan tersebut dirancang di atas kertas.

b. Kemampuan Peraturan untuk Menstrukturkan Implementasi

Kemampuan sebuah peraturan untuk menstrukturkan implementasi kebijakan adalah faktor kunci yang menentukan seberapa efektif kebijakan tersebut dapat dijalankan. Peraturan yang baik harus menyediakan kerangka kerja yang jelas, sehingga lembaga pelaksana dan pihak-pihak terkait dapat memahami, menjalankan, dan mengawasi kebijakan tersebut secara efektif. Untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada dalam peraturan.

Pertama, peraturan harus didasarkan pada teori sebab-akibat yang memadai. Artinya, kebijakan harus memiliki dasar logis yang kuat mengenai bagaimana tindakan tertentu akan menghasilkan hasil yang

diinginkan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hubungan sebab-akibat ini, kebijakan berisiko gagal karena tidak ada kepastian bahwa langkah-langkah yang diambil akan memberikan dampak yang diharapkan.

Kedua, arahan kebijakan yang tidak ambigu sangat penting. Kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana atau kelompok sasaran. Kebijakan yang memiliki tujuan, langkah, dan tanggung jawab yang jelas akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Sebaliknya, kebijakan yang kabur atau penuh dengan interpretasi ganda sering kali menimbulkan konflik atau kebingungan di lapangan.

Ketiga, ketersediaan sumber daya keuangan menjadi elemen penting lainnya. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai aspek, seperti pelatihan pelaksana, penyediaan infrastruktur, atau kampanye publik. Jika sumber daya keuangan terbatas, implementasi akan terganggu, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali.

Keempat, integrasi hierarkis dalam dan antar institusi pelaksana sangat diperlukan. Kebijakan sering kali melibatkan banyak lembaga, dan keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada seberapa baik lembaga-lembaga ini dapat bekerja sama. Integrasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, kurangnya koordinasi, atau konflik antar lembaga, yang semuanya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Kelima, aturan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan harus jelas. Proses pengambilan keputusan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten. Tanpa aturan yang jelas, pengambilan keputusan mungkin menjadi lambat, tidak efisien, atau bahkan tidak adil.

Keenam, perekrutan pejabat pelaksana yang kompeten juga merupakan aspek penting. Kebijakan hanya dapat berhasil jika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan dedikasi yang diperlukan. Perekrutan yang sembarangan atau tanpa mempertimbangkan kualifikasi akan menurunkan kualitas pelaksanaan.

Terakhir, akses formal oleh pihak luar, seperti kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau lembaga internasional, dapat menjadi nilai tambah. Pihak luar ini sering kali memiliki keahlian, sumber daya, atau sudut pandang yang dapat memperkaya proses implementasi. Dengan memberikan akses kepada mereka, pemerintah atau lembaga pelaksana dapat memanfaatkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kebijakan.

Kemampuan peraturan untuk menstrukturkan implementasi kebijakan adalah tentang menciptakan pedoman yang jelas, terorganisasi, dan mendukung semua pihak yang terlibat. Peraturan yang dirancang dengan baik akan mengurangi hambatan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Tanpa peraturan yang baik, bahkan kebijakan yang paling ambisius pun berisiko gagal di tahap implementasi.

c. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi

Faktor-faktor di luar peraturan resmi yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan mencakup elemen-elemen sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa faktor yang penting:

1. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Kondisi ekonomi masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, atau kemajuan teknologi yang ada, dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. Misalnya, kebijakan yang mengharuskan penggunaan teknologi tertentu akan lebih mudah diterapkan di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.

2. Perhatian media terhadap masalah

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran tentang suatu masalah. Jika media aktif memberitakan tentang kebijakan, hal ini bisa mempercepat proses pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

3. Dukungan publik

Jika masyarakat luas mendukung kebijakan, maka implementasinya akan jauh lebih mudah. Dukungan ini bisa berupa

partisipasi aktif atau sikap positif terhadap perubahan yang diusulkan. Sebaliknya, jika kebijakan tidak didukung oleh masyarakat, bisa terjadi resistansi yang menghambat penerapan kebijakan.

4. Sikap dan sumber daya kelompok konstituen

Kelompok yang menjadi sasaran kebijakan harus memiliki sikap yang mendukung serta sumber daya yang cukup untuk mengikuti kebijakan tersebut. Sebagai contoh, jika kebijakan berkaitan dengan pendidikan, maka penting bagi sekolah dan orang tua untuk memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

5. Dukungan dari pemegang kekuasaan

Dukungan dari pejabat pemerintah atau pemimpin politik yang memiliki pengaruh besar sangat penting dalam kelancaran implementasi kebijakan. Tanpa dukungan yang kuat dari pihak yang berkuasa, kebijakan dapat terhambat atau bahkan tidak berjalan dengan efektif.

6. Komitmen dan kepemimpinan pejabat pelaksana

Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Pemimpin yang berkomitmen dapat memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan

benar, memotivasi staf, dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Faktor-faktor non-statutory ini sangat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat. Meskipun peraturan dan pedoman hukum sangat penting, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada kondisi sosial-ekonomi, dukungan publik, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Faktor-faktor ini harus diperhatikan dan dikelola dengan baik agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. melalui program sosialisasi, dan memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi dinamika eksternal.

2. Tahapan proses implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier

Tahapan proses implementasi kebijakan mencakup beberapa langkah mulai dari pembuatan kebijakan, pengalokasian sumber daya, hingga evaluasi dan revisi kebijakan jika diperlukan. Secara garis besar, berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dipahami dalam implementasi kebijakan:

a. Keluaran Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang sudah disahkan diterjemahkan menjadi pedoman operasional dan prosedur oleh lembaga pelaksana. Sosialisasi kepada pihak terkait dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan juga dilakukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan.

b. Kepatuhan oleh Kelompok Sasaran

Setelah kebijakan diterapkan, tahap berikutnya adalah mengukur sejauh mana kelompok sasaran mematuhi kebijakan tersebut. Kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman, dukungan, dan kemampuan kelompok sasaran dalam mengikuti kebijakan yang ada.

c. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan diukur untuk menilai hasil nyata dari kebijakan tersebut, baik yang diinginkan (misalnya perbaikan sosial atau ekonomi) maupun yang tidak diinginkan (misalnya efek sampingan negatif). Evaluasi dampak penting untuk menilai efektivitas kebijakan.

d. Dampak yang Dirasakan

Masyarakat perlu merasakan manfaat dari kebijakan agar implementasi dianggap berhasil. Penilaian persepsi publik terhadap kebijakan dilakukan melalui survei atau diskusi untuk mengetahui apakah kebijakan dirasakan bermanfaat atau justru merugikan.

e. Revisi Peraturan

Jika kebijakan tidak memberikan hasil yang diinginkan atau menghadapi hambatan, revisi kebijakan perlu dilakukan. Revisi ini bisa mencakup perubahan aturan, penyesuaian implementasi, atau peningkatan komunikasi dengan masyarakat.

Proses implementasi kebijakan melibatkan beberapa tahap, dari keluarnya kebijakan, kepatuhan sasaran, hingga evaluasi dan revisi kebijakan. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi yang baik, kesiapan pelaksana, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten sinjai adalah dengan pendekatan eksploratif secara kualitatif. Pendekatan Eksploratif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru dari fenomena-fenomena tertentu.²⁹ Metode pendekatan eksploratif digunakan untuk memetakan suatu objek secara relative mendalam.³⁰

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang proses implementasi oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, Tindakan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan manfaat berbagai metode ilmiah.³¹ Selain itu, subjek penelitian dibahas secara mendalam dalam penelitian kualitatif ini. Sebagai langkah awal, teknisnya penulis melakukan tahapan

²⁹ F. Elvis Purba and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Percetakan SADIA, 2011) hal. 17.

³⁰ Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (PT. Rineka Cipta, 2020) hal 7.

³¹ J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi dan data langsung yang terkait dengan implementasi program smart city/smart kampung di Kabupaten Sinjai.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah aparatur desa di tiga desa yaitu Desa Tongke-tongke, Desa Kaloling, dan Desa Salohe. Tiga desa yang menjadi lokasi penelitian dipilih berdasarkan kategori Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023. Salah satu cara untuk menilai dampak positif program terhadap pembangunan desa adalah dengan melihat hasil dari indeks tersebut. Indeks Pembangunan Desa ini direalisasikan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Kementerian Desa, melalui Permendesa tersebut, telah menetapkan sejumlah indikator yang memudahkan desa untuk mengukur tingkat kemandiriannya.³² Dalam Indeks Desa Membangun, ada 5 klasifikasi Status kemajuan dan kemandirian desa yaitu :

1. Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi (lingkungan)

³² Hudi Moh. Setyobakti, 'Identification of Village Problems and Potentials Based on Village Development Index (IDM) in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency', *Wiga: Journal of Economic Research*, 7.1 (2018), pp. 1–14.

yang berkelanjutan. Desa Mandiri memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,8155.

2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
3. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan sama dengan 0.7072 dan lebih besar dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, goncangan ekonomi, dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi

yang dimiliki. Desa sangat Tertinggal memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) Kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Sebagai penunjang kelengkapan data penelitian, penulis juga melakukan wawancara ke instansi yang terkait langsung dengan program smart city/smart kampung yaitu Dinas Komunikasi, Informasi & Persandian Kabupaten Sinjai. Waktu dan pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai bulan September.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan proses wawancara dengan kepala desa serta beberapa aparatur desa, di Desa Tongke-tongke, Desa Kaloling, dan Desa Salohe, terkait tentang hasil implementasi program smart city/smart kampung. Sedangkan, pengumpulan data terkait proses implementasi program, penulis melakukan wawancara pada Dinas Komunikasi, Informasi & Persandian. Dalam proses pengumpulan data, berikut nama yang diwawancarai oleh peneliti:

- a. Mansyur, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sinjai.
- b. Muhammad Takdir, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian.

- c. Haryanti Arif, Kepala Seksi Tata E-Government, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian.
- d. Hasta Manggala, Teknisi Jaringan Program Smart kampung di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian.
- e. Sirajudin, Kepala Desa Tongke-tongke.
- f. Bustan, Kepala Desa Kaloling.
- g. Ambo Tang, Kepala Desa Salohe.
- h. Darmansyah, Kaur Umum atau Admin Website Desa Tongke-tongke
- i. Fadli, Kasi Pemerintahan atau Admin Website Desa Kaloling.
- j. Supriadi, Kaur Tata Usaha dan Umum atau Admin Website Desa Salohe.

Dalam memperoleh kelengkapan data penelitian, objek penelitian ini meliputi Dinas Komunikasi, Informasi, dan persandian, Desa Tongke-tongke, Desa Kaloling, dan Desa Salohe. Selanjutnya, dalam pengumpulan data sekunder guna mendukung hasil penelitian penulis. Data penelitian ini juga merujuk kepada sejumlah sumber-sumber lainnya seperti buku, artikel jurnal, dokumen pemerintahan, dan media cetak.

3. Metode Pengumpulan Data

Pertama, observasi. Meninjau langsung tempat lokasi penelitian dan mengamati kondisi internal di Dinas dan Desa objek penelitian. selain itu, juga melihat bagaimana proses pelatihan pembuatan website di ruang kantor dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Kedua, wawancara. Target data yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini adalah dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Sinjai terbuka untuk memberikan data terkait regulasi, pelaksanaan program smart city/smart kampung, serta tujuan program dan anggaran. Sedangkan, dari pihak sasaran program, selain pengajuan pertanyaan terkait bagaimana implementasinya di desa, juga menanyakan terkait dampak terhadap hasil implementasi program smart city/smart kampung.

Ketiga, dokumentasi. Berupa tulisan, rekaman dan pengambilan gambar dengan subjek-subjek penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data setelah melakukan penelitian, kemudian data yang diperoleh diurutkan ke dalam model uraian mendasar agar dapat dijabarkan kesimpulan berdasarkan fakta aktual. Tahap analisis yang dilakukan dari awal hingga akhir. Yakni dilakukan dengan cara mengkonsepkan data secara sistematis dan teratur sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas terhadap hasil penelitian. Data yang diperoleh tersebut dapat dikaji kemudian disusun ke dalam dokumen-dokumen aktual dan diversifikasi lebih mendalam kemudian dapat menghasilkan kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul.³³

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, menyusun, menjabarkan, mengkategorisasikan data yang

³³ B. Millies Mathew and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi* (UI Press, 1992), hlm. 16.

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis eksploratif kualitatif, yakni suatu analisis yang digunakan untuk memetakan suatu objek relative mendalam. dalam hal ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang proses implementasi oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, Tindakan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan manfaat berbagai metode ilmiah.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Diperuntukkan untuk memetakan dan mempermudah pembahasan penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pembahasan yang termuat ke dalam beberapa sub-sub pembahasan, diantaranya, penjelasan komprehensif terkait gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi data demografi, topologi dan gambaran program kampung pintar di Kabupaten Sinjai.

Bab ketiga, membahas tentang konsep program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten sinjai.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dimana mendeskripsikan dan menganalisis data dari penelitian yang dilakukan. Bab ini menggambarkan bagaimana implementasi program smart city/smart kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kabupaten Sinjai.

Bab kelima diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bab terakhir menyajikan tanggapan atas rumusan masalah di bab pertama, dan pembahasan tentang rumusan rekomendasi untuk pengembangan program kampung pintar di Kabupaten Sinjai sebagai saran atau masukan bagi pihak terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa. Pemanfaatan teknologi seperti OpenSID dan SIDEKA-NG menjadi landasan utama dalam transformasi digital ini. Namun, keberhasilan implementasi program tidak terlepas dari berbagai faktor penentu, termasuk ketersediaan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang memadai.

Dari aspek teknologi, program Smart Kampung telah memanfaatkan platform yang valid untuk digitalisasi layanan, seperti pengelolaan administrasi dan data kependudukan. Kendati demikian, beberapa desa menghadapi kendala infrastruktur, terutama akses internet, yang menghambat optimalisasi teknologi. Desa Tongke-Tongke, misalnya, menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi layanan digital, didukung oleh literasi digital yang memadai di kalangan masyarakat dan perangkat desa. Sebaliknya, desa seperti Kaloling dan Salohe masih bergulat dengan keterbatasan literasi digital dan infrastruktur, yang mengurangi efektivitas implementasi program.

Selain itu, tantangan utama lain terletak pada kurangnya regulasi teknis yang spesifik. Hingga saat ini, Kabupaten Sinjai belum memiliki Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus memberikan panduan implementasi program Smart

Kampung. Kebijakan yang ada sering kali terlalu umum, sehingga sulit diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret di tingkat desa. Hal ini menyebabkan adanya disparitas dalam pelaksanaan program antar-desa, yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan keuangan, tingkat literasi digital, dan kepemimpinan desa.

Keragaman sosial-ekonomi dan perilaku masyarakat desa juga memengaruhi penerimaan terhadap program ini. Desa-desa dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, seperti Tongke-Tongke, menunjukkan adaptasi yang lebih cepat terhadap layanan berbasis digital. Sebaliknya, desa-desa dengan literasi digital rendah membutuhkan intervensi tambahan berupa pelatihan dan pendampingan. Dukungan pemerintah kabupaten melalui alokasi anggaran dan pelatihan memang telah memberikan dasar bagi implementasi program, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program di desa-desa yang menghadapi tantangan besar.

Faktor eksternal, seperti dukungan media, tingkat penerimaan publik, dan komitmen dari pemimpin desa, memainkan peran penting dalam keberhasilan program. Kepala Desa Tongke-Tongke, misalnya, menunjukkan komitmen tinggi dengan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur digital dan melatih perangkat desa. Di sisi lain, desa seperti Kaloling dan Salohe memerlukan perhatian lebih, baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan infrastruktur teknologi.

Dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang ada, program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai membutuhkan strategi implementasi yang lebih

terarah. Peningkatan literasi digital masyarakat, perluasan akses infrastruktur teknologi, serta pengembangan kebijakan yang lebih spesifik dan relevan menjadi langkah penting untuk memastikan program ini dapat diterapkan secara merata. Dengan demikian, diharapkan program Smart Kampung mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Agar implementasi program Smart Kampung di Kabupaten Sinjai berjalan lebih efektif, diperlukan berbagai langkah strategis yang mendukung keberlanjutan program ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, sekaligus memaksimalkan potensi digitalisasi pelayanan publik di desa-desa.

1. Penguatan infrastruktur teknologi, menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu memastikan bahwa akses internet tersedia secara merata, termasuk di desa-desa terpencil yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Langkah ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan perangkat teknologi yang memadai, serta subsidi atau penyediaan jaringan internet gratis untuk masyarakat desa.
2. Peningkatan literasi digital, masyarakat dan aparat desa harus dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan dan pendampingan yang sistematis diperlukan untuk memperkenalkan teknologi digital serta meningkatkan kemampuan mengoperasikan platform seperti OpenSID dan SIDEKA-NG. Sosialisasi

mengenai pentingnya digitalisasi juga harus ditekankan, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi perubahan menuju layanan berbasis teknologi.

3. Pengembangan kebijakan spesifik, yang mendukung implementasi program ini. Pemerintah Kabupaten Sinjai disarankan untuk menyusun regulasi khusus, seperti Peraturan Bupati (Perbup), yang memberikan arahan teknis bagi pelaksanaan program Smart Kampung. Regulasi ini sebaiknya mencakup panduan mengenai alokasi anggaran, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi antar-institusi.
4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar-desa, menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi program. Pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi yang memungkinkan desa-desa berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Forum atau kelompok kerja lintas desa dapat dibentuk untuk mendukung terciptanya kerja sama yang lebih efektif.
5. Alokasi anggaran yang memadai, harus dipastikan untuk mendukung keberlanjutan program. Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat mempertimbangkan peluang pendanaan dari sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk melengkapi pembiayaan infrastruktur dan pelatihan. Desa-desa juga diharapkan mampu mengalokasikan anggaran desa secara strategis untuk mendukung pengembangan teknologi digital.
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, perlu menjadi bagian dari pelaksanaan program ini. Sistem evaluasi yang terstruktur akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta kelemahan dalam implementasi kebijakan,

sehingga program dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

7. Peningkatan komitmen kepemimpinan lokal, juga menjadi elemen penting. Kepala desa dan pemimpin lokal lainnya diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong keberhasilan program dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, mendukung pelatihan, serta memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital.
8. Optimalisasi sosialisasi program, harus dilakukan secara inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki literasi digital rendah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media yang mudah diakses, seperti media sosial, radio lokal, atau pertemuan komunitas, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adamowicz, Mieczyslaw, and Magdalena Zwolinska-Ligaj. "The 'Smart Village' as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 16 (2020).
- Addiansyah, M. "Desa Cerdas Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi: Belajar Dari Desa Mojowarno." *Matra Pembaruan* 8, no. 1 (2024): 75–88.
- Ali, Marsuki. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi STISIP Muhammadiyah Sinjai*. Sinjai, 2016.
- ANAS, S. A. "Dampak Kebijakan Pariwisata Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi (Studi Di Desa Blimbingsari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi)." *KOMINFO*. Last modified 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/program-desa-digital-bantu-wujudkan-pemerintahan-pintar/>.
- Arikanto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020.
- Asmania, Sri. "IDM Kabupaten Sinjai Peringkat Kelima Di Sulsel, 9 Desa Masuk Kategori Desa Mandiri." *SINJAIKAB.GO.ID*. Last modified 2021. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/07/06/idm-kabupaten-sinjai-peringkat-kelima-di-sulsel-9-desa-masuk-kategori-desa-mandiri/>.
- Ayuntamara, Sekar, and Choirul Anam. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Kurikulum." *Jurnal Al-Yasin* 11, no. 361 (2021): 497–505.
- BAPPENAS. "Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023." *Satu Data Indonesia*. Last modified 2024. <https://katalog.data.go.id/dataset/indeks-desa-membangun-idm-tahun-2023/resource/5e68a818-c620-48e5-a8b2-6351ab29ea2f>.
- Biswas, R, BR Chakma - The Journal of Development, and undefined 2023. "Driving Development through Smart Village in Tripura: An Overview." *Journals.Dbuniversity.Ac.in* 8 (n.d.): 2023. <https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/jdp/article/view/4032>.
- Bovens, M. "Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework." *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–468.
- Chandra, Ricky Marcelino, Michael Kurniawan Sudjianto, and Erica Adriana.

- “Faktor-Faktor Komunikasi (Yang Perlu Dimiliki) Generasi Z Dalam Mempersiapkan Karir.” *Student Research Journal* 1, no. Juni (2023): 1–7. <http://dspace.nelson.usf.edu/xmlui/handle/10806/10>.
- Cohen, Boyd. “The Smarterst Cities in the World 2015.” *Fastcompany*, 2014. <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. “The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*” 75, no. 5 (2015): 664-672.
- Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe, 2003.
- . “The New Public Service: Serving Rather than Steering.” *Public Administration Review* 60, no. 6 (2000): 549-559.
- Dpmptsp.sulselprov.go.id. “Profil Kabupaten Sinjai.” *Dpmptsp.Sulselprov.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed March 20, 2024. <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=17>.
- Dr. Agus Subianto, M.Si. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Brilliant Didistribusikan Oleh PT Menuju Insan Cemerlang Media Distribusi Cemerlang Landmark Modern Shop House A-17. Vol. 1, 2020. http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/KebijakanPublik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
- E-government, Pengembangan. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government*. Vol. 2004, 2003.
- Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma, and Nur Inzana. “Peluang Dan Tantangan Smart Village Di Era 4.0 (Studi Analisis Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal).” *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)* 5, no. 2 (2022): 84–93. <https://doi.org/10.24905>.
- Eshet-Alkalai, Yoram. “Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era.” *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 13 (2004): 93–106.
- Febriana, Kharisma Ayu, and Yuliyanto Budi Setiawan. “Komunikasi Dalam Difusi Inovasi Kerajinan Enceng Gondok Di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang.” *The Messenger* VIII (2016): 17–26. <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/G072/20171206071643-KOMUNIKASI-DALAM-DIFUSI-INOVASI-KERAJINAN-ENCENG-GONDOK-DI-DESA-TUNTANG,-KABUPATEN-SEMARANG.pdf>.

- Giffinger, R. "Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities." *Research Institute for Housing, Urban and Mobility Services* 16, no. October (2007): 1–24. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026427519800050X>.
- Gita. "Nama OPD Pemda Sinjai Beserta Alamat Lengkap." *Harian.News*. Last modified 2024. <https://harian.news/nama-opd-pemda-sinjai-beserta-alamat-lengkap>.
- Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, Dian DInanti, dan Nindya Sari. *Smart Village Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Inovasi Dan Digital*. Edited by Tim UB Press. 1st ed. Malang: UB Press, 2021.
- Heeks, Richard, and Shyam Krishna. "ICTs and Hope for Development: A Theoretical Framework." *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 77, no. 1 (2016).
- Herdiana, Dian. "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia." *IPTEK-KOM* 1–6 (2019).
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Himawan Indrajat. "Policy Implementation on Guidelines for New Habits Adaptation Lampung Province: Survey on Student Groups." *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* 628, no. ULICoSS 2021 (2022): 526–533.
- Indra, Muhammad Mishbah, Betty Purwandari dan Dana, and (ICITSI). "Systematic Review and Meta-Analysis of Proposed Smart Village Conceptual Model: Objectives, Strategies, Dimensions, and Foundations." *International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)* (2018): 127–133. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:133605942>.
- Jonathan, Donner, and Marcela X. Escobar. "A Review of Evidence on Mobile Use by Micro and Small Enterprises in Developing Countries." *Journal of International Development* 22, no. 5 (2010): 641–658.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika*, 2016.
- . *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika*, 2016.
- Komorowski, Łukasz, and Monika Stanny. "Smart Villages: Where Can They Happen?" *Land* 9, no. 5 (2020).
- Kurniawan, Fahmi, Randi Rian Putra, and Aldi Alvin. "Peran Sistem Informasi Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pertumbuhan Kecamatan

- Wampu.” *Jurnal mahajana informasi* 9, no. 2 (2024): 25–32.
https://www.researchgate.net/publication/383196910_Peran_Sistem_Informasi_Desa_Dalam_Peningkatan_Pelayanan_Publik_Di_Desa_Pertumbuhan_Kecamatan_Wampu.
- Layne, Karen, and Jungwoo Lee. “Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model.” *Government Information Quarterly* 18, no. 2 (2001): 122–136.
- Lusianto. “Menuju Desa Cerdas.” *Opendesa.Id*. Last modified 2023.
<https://opendesa.id/tentang-kami/>.
- Mansyur. *SK Tim Sosialisasi Smart Kampung-TTE*, 2023.
- Mathew, B. Millies, and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 1992.
- May, Christopher, and Andrew Chadwick. “Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet : ‘ E-Government ’ in the United States , Britain and the European Union.” *Governance* 16, no. 2 (2003): 271–300.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Fahrijal Anshori, and Dede Nurohman. “Efektivitas Penyediaan Internet Desa Untuk Peningkatan Promosi Umkm Di Temenggungan Udanawu Blitar.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 9 (2022): 2245–2258.
- Mulyono. “Model Kerangka Analisis Implementasi (Daniel Mazmanian Dan Paul A. Sabatier).” *Free Writting in the Wall*, 2009.
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/31/model-kerangka-analisis-implementasi-daniel-mazmanian-dan-paul-a-sabatier/>.
- Muzaqi, Ajie Hanif, and Berlian Tyasotyaningrum. “Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency).” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 10, no. 1 (2022): 42–53.
- Nabatchi, T. “Putting the ‘Public’ Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values.” *Public Administration* 72, no. 5 (2012): 699–708.
- Nataniel, Dengen, and Heliza Rahmania Hatta. “Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser” 4, no. 1 (2009): 47–54.
- Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47.
- Nugroho, Dr. Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis*

- Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Politik*. Edited by Yulian Masda. 7th ed. Jakarta, 2023. https://books.google.co.id/books?id=WCG_EAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.
- Park, Jonghoon and Lee, Seongwoo. "Smart Village Projects in Korea: Rural Tourism, 6th Industrialization, and Smart Farming" (2019): 139–153. https://www.researchgate.net/publication/333147997_Smart_Village_Projects_in_Korea_Rural_Tourism_6th_Industrialization_and_Smart_Farming.
- Persandian, Dinas Kominfo dan. "Masterplan Smart City Kabupaten Sinjai 2019 – 2023 | I" (2023).
- Pratama, Gita Nanda. "Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 424.
- Purba, F. Elvis, and Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan SADIA, 2011.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Renukappa, Suresh, Subashini Suresh, Wala Abdalla, Nisha Shetty, Nagaraju Yabbati, and Rahul Hiremath. "Evaluation of Smart Village Strategies and Challenges." *Smart and Sustainable Built Environment* (2022).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Bi.Go.Id*, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Reskinaswara, Leski. "Gerakan Menuju 100 Smart City." *KOMINFO*. Last modified 2022. Accessed March 20, 2024. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/gerakan-menuju-100-smart-city-2/>.
- Rini Rachmawati. "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency." *Jurnal Sistem Cerdas* 1, no. 2 (2018): 12–19.
- Rizkinaswara, Leski. "Gerakan Menuju 100 Smart City – Ditjen Aptika." *Aptika* (2022): 1–14. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/gerakan-menuju-100-smart-city-2/#:~:text=Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan program yang,plan%29 Smart City dan menerapkannya pada masing-masing daerah>.
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press, 2003.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. "Conceptual Framework, The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis, Universitas of California and Pomona College." *Policy Studies Journal* 8, no. 4 (1980): 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266>.
- Saidah, Nur, Lailatul Khasanah, Asriyatzahra, and Siti Ridloah. "Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan Dalam Mendukung

- Program Smart Village.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6, no. 2 (2022): 123–135.
- Setyobakti, Hudi Moh. “Identification of Village Problems and Potentials Based on Village Development Index (IDM) in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency.” *Wiga: Journal of Economic Research* 7, no. 1 (2018): 1–14.
- Sinjai, Pemerintah Kabupaten. *Perda-No.-14-Th-2005-Pemekaran-Desa-Kampala*. Vol. 1999, 2012.
- Sirajuddin. “Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Tongke-Tongke.” Last modified 2024. <https://tongketongke.desa.id/data-statistik/pekerjaan>.
- Sivitas. *Tomohon Masuk Program Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia*, 2020. <https://www.kominfo.go.id/berita/pengumuman/detail/tomohon-masuk-program-gerakan-menuju-100-smart-city-indonesia>.
- Somwanshi, Rutuja, Utkarsha Shindepatil, Deepali Tule, Archana Mankar, Namdev Ingle, G Rajamanya, and A Deshmukh. “Study and Development of Village as a Smart Village.” *International Journal of Scientific & Engineering Research* 7, no. 6 (2016): 395–408. <http://www.ijser.org>.
- Stojanova, Simona, Gianluca Lentini, Peter Niederer, Thomas Egger, Nina Cvar, Andrej Kos, and Emilija Stojmenova Duh. “Smart Villages Policies: Past, Present and Future.” *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 4 (2021): 1–28.
- Tang, Ambo. “Geografis Desa Salohe.” *Website Resmi Desa Salohe*. <https://salohedesasalohe.id/geografis>.
- Tri Fitriasari, Ersas. “Akselerasi Kota Dan Desa Cerdas Berkelanjutan.” *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 45–56.
- United Cities and Local Government Asia-Pacific. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah.” *United Cities and Local Government* (2017): 1–24. <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>.
- UU Pemerintah RI. *UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008)*. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (JTIK) STMIK ProVisi Semarang*, 2008.
- UU RI. *UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004. [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf).
- Visvizi, Anna, and Miltiadis D. Lytras. “Sustainable Smart Cities and Smart

Villages Research: Rethinking Security, Safety, Well-Being, and Happiness.” *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 1 (2020): 10–13.

Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2018).

Waris, Irwan, Ani Susanti, and Muhammad Afandi. “Preparation of Smart Village in Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province, Indonesia.” *Journal of Public Policy and Administration* 8, no. 1 (2024): 7–13.

“OpenSID.” *OpenDesa*. Last modified 2023. <https://opendesa.id/sistem-informasi-desa-opensid/>.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

Wawancara

Ambo Tang, Wawancara dengan Kepala desa Salohe, pada tanggal 13 Agustus 2024.

Bustan, Wawancara dengan Kepala Desa Kaloling, Pada tanggal 12 Agustus 2024.

Darmansyah, wawancara dengan kaur umum/Admin website Desa Tongke-tongke pada tanggal 12 Agustus 2024.

Fadli wawancara dengan Kasi Pemerintahan/Admin website desa kaloling, pada tanggal 12 Agustus 2024. Haryanti Arief, wawancara dengan Kepala Seksi Tata E-Government , pada tanggal 24 Juli 2024

Haryanti Arief, wawancara dengan Kepala Seksi Tata E-Government , pada tanggal 24 Juli 2024

Hasta Manggala, wawancara dengan Tehnisi Jaringan Dinas Kominfo dan Persandian pada tanggal 21 Agustus 2024.

Mansyur, Wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, pada tanggal 24 Juli 2024.

Muhammad Takdir, Wawancara dengan Kepala Bidang Aptika pada tanggal 29 Juli 2024.

Muhammad Takdir, wawancara dengan Kepala Bidang Aptika pada tanggal 21 Agustus 2024.

Sirajudin, wawancara dengan Kepala Desa Tongke-tongke, pada tanggal 12 Agustus 2024

Supriadi, wawancara dengan kaur tata usaha dan umum/Admin website Desa Salohe pada tanggal 15 Agustus 2024.